

**TESIS**

**PEMBERIAN KEWENANGAN *ADVISORY OPINION* KEPADA  
MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PERUBAHAN UNDANG-  
UNDANG DASAR NRI 1945**



**Disusun Oleh:**

**MOH. BAGUS**

**NIM: 12118004**

**PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2020**

**TESIS**

**PEMBERIAN KEWENANGAN *ADVISORY OPINION* KEPADA  
MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PERUBAHAN UNDANG-  
UNDANG DASAR NRI 1945**

**Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi  
Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh:  
MOH. BAGUS  
NIM: 12118004**

**PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2020**

Lembar Pengesahan

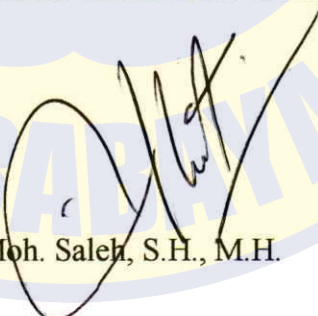
TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL: 22 Pebruari 2020

OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

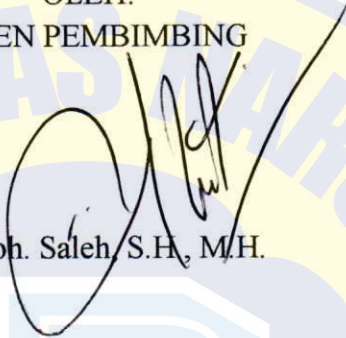
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

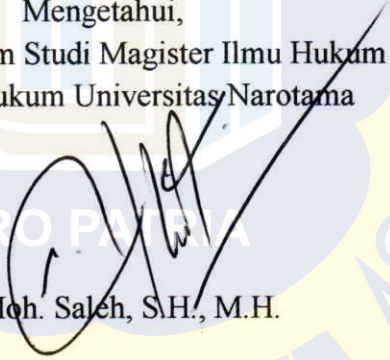
LEMBAR PENGESAHAN  
TESIS INI TELAH DIREVISI  
PADA TANGGAL: 05 MARET 2020

OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

TESIS

PADA TANGGAL : 26 Februari 2020

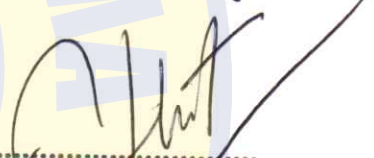
TIM PENGUJI TESIS

Ketua :  
Dr. RUSDIANTO SESUNG S.H., M.H



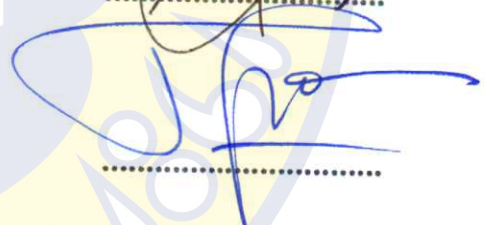
.....

Anggota :  
Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H\*)



.....

Anggota :  
Dr. SUWARDI, S.H., M.H.



.....





**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS\***

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus

No. Induk Mahasiswa : 12118004

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Pemberian kewenangan Advisory Opinion kepada Mahkamah Konstitusi Melalui perubahan Undang - Undang Dasar MRI 1945

2. \_\_\_\_\_

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Menyetujui,  
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Surabaya, 01 September 2019.  
Mahasiswa

Moh. Bagus

\* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MH



**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS\***

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan oleh mahasiswa serta setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis menyetujui/tidak menyetujui \*) judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut:

I. Nama Mahasiswa : Moh. Bagus  
Nomor Induk Mahasiswa : 12118009  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

II. Judul Tesis: Pemberian Kewenangan Advisory Opinion kepada  
Mahtamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui  
perubahan UUD NKRI 1945

III. Nama Pembimbing: Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

Disetujui oleh Dewan Tesis,  
Di Surabaya Pada Tanggal 01, Oktober 2019,

Ketua

DR. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Sekretaris

TAHEGGA PRIMANANDA, S.H., M.H.

\* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Moh. Saleh SH., MH

Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus

No. Induk Mahasiswa : 12118009

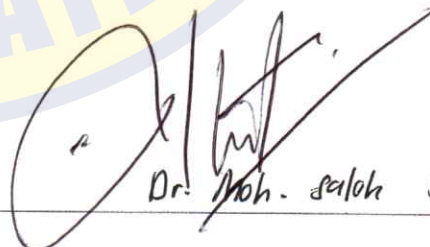
Judul : Pemberian Kewenangan Advisory Opinion

Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui

Perubahan UUD NRI 1945

PRO PATRIA

Surabaya, 02 September, 2019  
Calon Pembimbing,

  
Dr. Moh. Saleh SH., MH

\*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.





## FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)  
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)  
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117  
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213  
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

### SURAT PENUGASAN No.520/SPT/NR-FH/X/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.	12118004	MOH. BAGUS	Pemberian Kewenangan Advisory Opinion Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-undang Dasar NRI 1945

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 5 Oktober 2019  
Dekan,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.MHK.06.02  
Tgl Terbit : 1 Maret 2016  
Revisi : 01

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus  
No. Induk : 12118004  
Alamat : Jl. Pabrik Kulit No. 37 B Wonocolo-Surabaya  
Telp/HP : 0812-4691-2527  
Pembimbing : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H  
Judul Tesis : Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui  
Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945  
Tgl Dimulai : 05 Oktober 2019

Surabaya, 12 Desember 2019

Pembimbing

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

Mahasiswa

Moh. Bagus

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMBIMBING
1.	latar belakang dan rumusan masalah.		
2.	perbaikan latar belakang dan duteksi teori yg dipakai		
3.	metodologi penelitian hukum		
4.	perbaikan pendataan dalam penelitian dan teknik penulisan		
5.	Acc.		

- Syarat :
1. Pengajuan seminar Proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
  2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

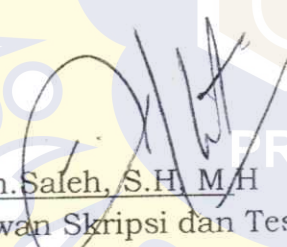
## SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

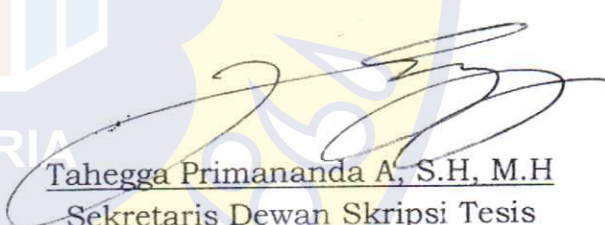
Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

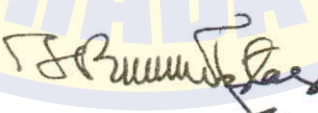
1. Nama Mahasiswa : MOH. BAGUS
2. NIM : 12118004
3. Judul Skripsi /Tesis : Pemberian Kewenangan Advisory Opinion Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-undang Dasar NRI 1945

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 6 Desember 2019  
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:

  
Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H  
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

  
Tahegga Primananda A, S.H, M.H  
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

  
Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.  
Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL\***

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus

No. Induk Mahasiswa : 12118004

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 36

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**PEMBERIAN KEWENANGAN *ADVISORY OPINION* KEPADA MAHKAMAH  
KONSTITUSI MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945**

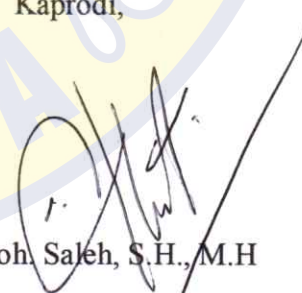
Surabaya, 05 Desember 2019

Menyetujui Untuk Diuji,  
**PRO PATRIA**

Pembimbing,

Kaprodi,

  
Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

  
Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

\* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap (Sampul warna merah )
3. Copy kwitansi pembayaran Tesis



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS**

NAMA : Moh. Bagus  
NIM : 12118004  
Tanggal Penilaian :  
Judul Tesis : Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945  
Pembimbing : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

**PANITIA PENILAIAN PROPOSAL TESIS**

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum	
ANGGOTA	Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Prof. Dr. H. Afdol, S.H. M.S	

Surabaya, 16 Desember 2019

Pembimbing,

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**FORM PENGAJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus  
No. Induk Mahasiswa : 12118004  
Program Studi/Angkatan : Magister Hukum / 36

Dengan ini mengajukan permohonan SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS pada Program Studi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945**

Menyetujui Untuk Diseminarkan  
Pembimbing,

Surabaya, 17 Februari 2020  
Ka. Prodi

  
Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

  
Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

**KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI SEMINAR HASIL PENELITIAN  
TESIS**

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus

No. Induk : 12118004

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PENELITIAN	TGL	PARAF PEMBIMBING
1.	Chatrin Indahwati (12217098)	Tindak Pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris	16/08 2019	
2.	Agus Sutitono (12117037)	Wewenang Pemerintahan Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah berdasarkan asas otonomi	16/08/2019	
3.	Achmad Heri (12117038)	Politik hukum pembentukan peraturan daerah prov. Jatim mengenai penanaman modal	16/08/2019	
4.	M. Syaapat Djawhari (12117039)	Pengaturan badan usaha milik daerah prov. Jatim pasca terbitnya uu No. 23 tahun 2014 ttg pemda.	16/08/2019	
5.	I Made Parnada Dharma (12117012)	Penyalahgunaan kewenangan pengas kasus dalam moah berisikan obat yg mengandung Baktobeta ditinjau dari uu 05.75 2009	16/08/2019	
6.	Wong fung Yew (12117039)	perkawinan poligami dan campuran antara pria warga negara Malaysia dg wanita warganegara Malaysia dan Indonesia terdapat. hake	16/08/2019	
7.	Sayu Indah Samawati	Percoalan hukum terhadap paman pertera perclata yg telah mempunyai kelakuan hukum tetap yg tidak dapat dilaksanakan.	16/08/2019	
8.	Hidayatillah Ardiansyah	Langgungugat Notaris atas ketidaksesuaian harga transaksi penggantian pengikatan jual beli dg harga sebenarnya	16/08/2019	
9.	Dwi Wati	keabsahan akta jual beli yang idenitas pembeliannya masih dikawatirkan	19/02/20 u	





UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

10.	Febrian Wardana	perlindungan hukum terhadap debitur atas jaminan bank tanggungjawab yg berstatus menjadi pakek	19/02/2020	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
-----	-----------------	--	------------	--------------------	--------------------

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

*[Signature]*  
Moh. Saleh S.H., M.H

Surabaya, 19 Februari, 2020  
Mahasiswa

*[Signature]*  
Moh. Bagus



**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS**

Pada Hari ini Rabu Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis :

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus  
No. Induk Mahasiswa : 12118004  
Program Studi/Angkatan : Magister Hukum / 36  
Judul Penelitian : Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945

Yang Dihadiri oleh Dosen Pembimbing : Dr. Moh. Saleh S.H., M.H  
Dan Mahasiswa / Masyarakat umum berjumlah 20 Orang.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Tesis ini dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2020












Dosen Pembimbing : .....

Mahasiswa : .....

Peserta Seminar : .....

1. Siwani	16. M. Nurul Huda	31. Agnes o. wic Lawa Ay
2. ESTI	17. Rio Pasotio	32.
3. IRI.	18. Brilliant Nanda Prapgo	33.
4. Pram	19. Ritzy. Lint Lawa Lab	34.

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

5. Vanica Christiana.R 	20.	35.
6. Rr. MONICA 	21.	36.
7. Stefan Sankur Jhonem 	22.	37.
8. VANESSA . V. JONATHAN 	23.	38.
9. Gebby S. Adbe 	24.	39.
10. Yoga Andriyanto 	25.	40.
11. A. Nurul Fuada 	26.	41.
12. Filianty 	27.	42.
13. Hendrik Handoro L. 	28.	43.
14. ARI PUSUH S 	29.	44.
15. Wahyuudin 	30.	45.



**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS**

Pada Hari ini *Rabu* . . . . . Tanggal *19* . Bulan *Februari* . . . . . telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Tesis :

Nama Mahasiswa : MOH. BAGUS

No. Induk Mahasiswa : 12118004

Program Studi/ Angkatan : Magister Hukum/

Judul Penelitian : Pemberian Kewenangan Advisory Opinion Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-undang Dasar NRI 1945

Yang Dihadiri oleh Dosen Pembimbing : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Dan Mahasiswa / Masyarakat umum berjumlah *19* . . . Orang.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Tesis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

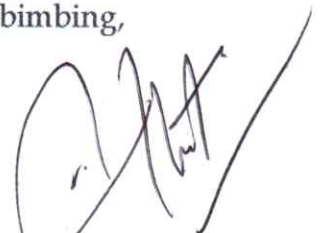
Surabaya, 19 Februari 2020

Penyanggah,



(Dr. Nynda Fatmawati O,  
SH, MH)

Pembimbing,



(Dr. MOH. SALEH, S.H.,  
M.H.)



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.04  
Tgl Terbit : 1 Oktober 2018  
Revisi : 00

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus  
No. Induk : 12118004  
Alamat : Jl. Pabrik Kulit No. 37 B Wonocolo-Surabaya  
Telp/HP : 0812-4691-2527  
Pembimbing : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H  
Judul Tesis : Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui  
Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945  
Tgl Dimulai : 12 Desember 2019

Surabaya, 19 Februari 2020

Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

Moh. Bagus

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMBIMBING
1.	Mekanisme peradilan dan Bab 2		
2.	Bab 2 dan penambahan substansi		
3.	Acc bab 2 lampir Bab 3		
4.	Bab 2 dan Bab 4 Mapan isi dan rekomendasi		
5.	Acc.		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Syarat :

1. Pengajuan seminar Proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

## SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

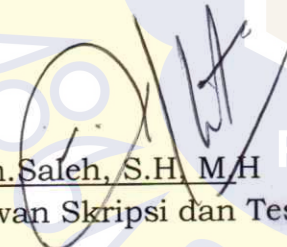
Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

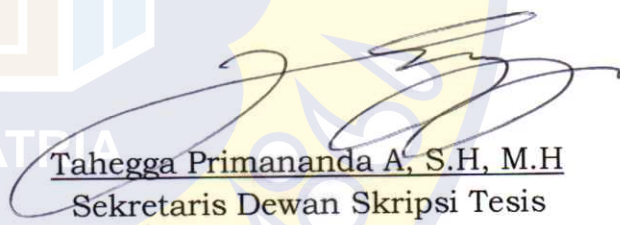
1. Nama Mahasiswa : MOH. BAGUS
2. NIM : 12118004
3. Judul Skripsi /Tesis : Pemberian Kewenangan Advisory Opinion Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-undang Dasar NRI 1945

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 6 Desember 2019


Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:

  
Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H  
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

  
Tahegga Primananda A, S.H, M.H  
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis



  
Dr. Risdianto Sesung, S.H, M.H.  
Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.MHK.06.01  
Tgl Terbit : 1 Maret 2016  
Revisi : 01

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS\***

Nama Mahasiswa : Moh. Bagus

No. Induk Mahasiswa : 12118004

Program Studi/Angkatan : Magister Ilmu Hukum / 36

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

**Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945**

Surabaya, 20 Februari 2020

Mengetahui,

Pembimbing,

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

Mahasiswa

Moh. Bagus

Menyetujui Untuk Diuji,  
Ketua Program Studi

Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

\* Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500
3. Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap





UNIVERSITAS *Narotama*

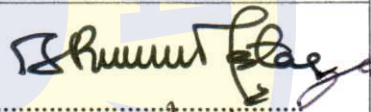
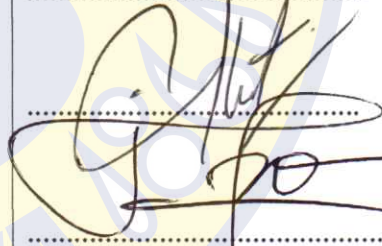
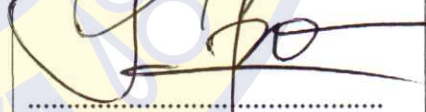
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS**

NAMA : MOH. BAGUS  
N I M : 12118004  
Tanggal Penilaian :  
Judul Tesis : Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah  
Konstitusi Republik Indonesia Melalui Perubahan Undang-Undang  
Dasar NRI 1945  
Pembimbing : Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

**PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS**

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H	
ANGGOTA	Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H PRO PATRIA	
ANGGOTA	Dr. Suwardi, S.H., MH	

Surabaya, 05 Maret 2020  
Pembimbing,

  
Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Pebruari 2020  
Yang membuat pernyataan,



Moh. Bagus  
NIM : 12118004

MOTTO

HIDUPLAH DI DUNIA SEAKAN-AKAN ENKKAU ADALAH ORANG  
ASING ATAU PENGEMBARA

BERKACA KEPADA RASULULLAH SAW SEBAGAI PERJALANAN  
HIDUP (09/09/2015)

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis limpahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan inayahnya sehingga penulis masih diberikan kesehatan yang tiada artinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945” dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Tentu Tesis ini penulis selesaikan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.

Dalam penulisan Tesis ini tentu tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan malaikat-malaikat yang setiap hari memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Moh. Saleh, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan rela meluangkan waktunya disela-sela kesibukanya untuk mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, baik para dosen, pegawai akademik dll yang telah memberikan sumbangsih keilmuan serta memberikan fasilitas dengan sangat baik.

Selain itu penghargaan yang utama, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

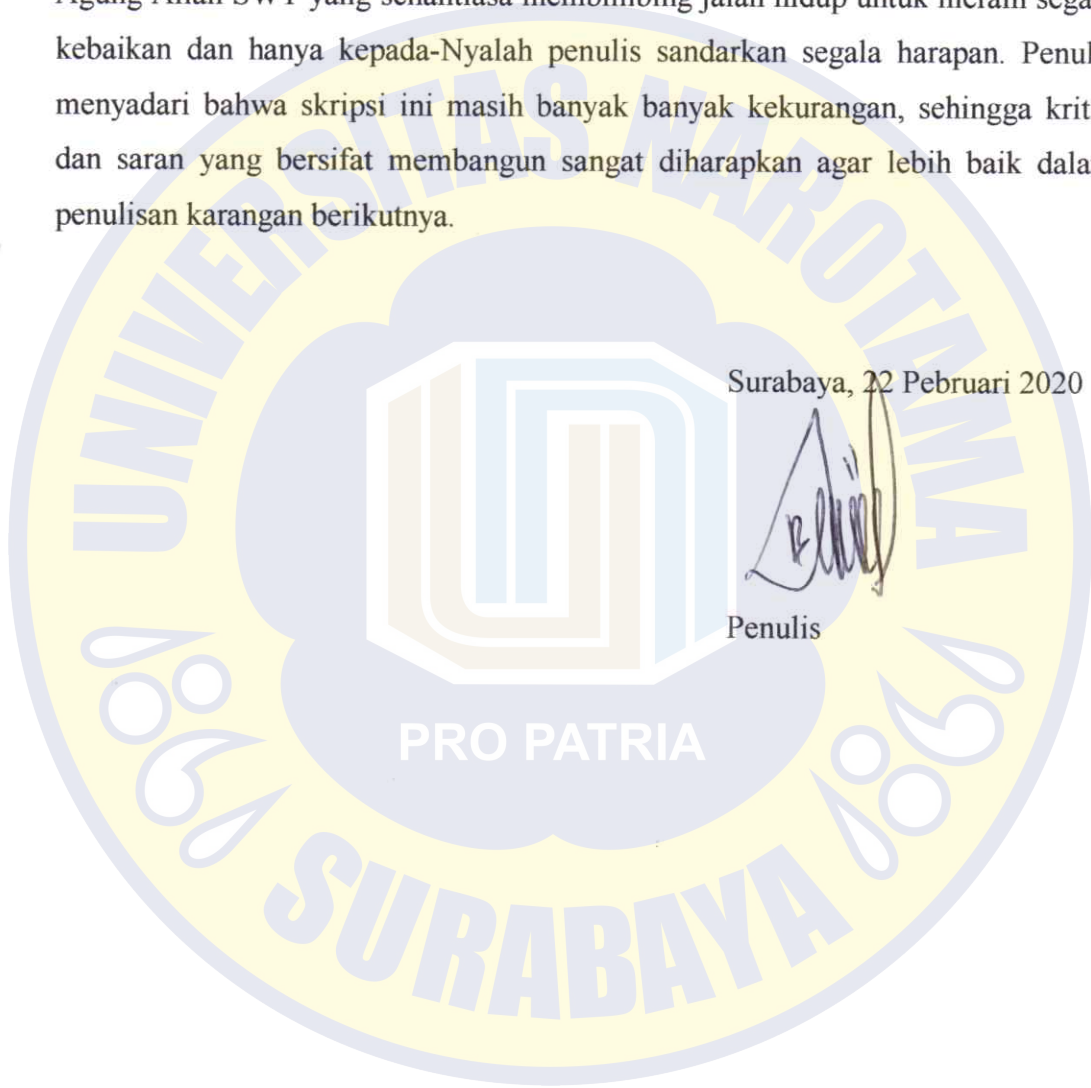
“Kedua orang tua penulis, Choirun Nasihin dan Suhartatik yang telah melahirkan, mendidik, dan mendukung penulis untuk selalu mencari ilmu dengan baik”

Akhirnya, lebih dari segala kemuliaan penulis panjatkan kepada Gusti Hang Agung Allah SWT yang senantiasa membimbing jalan hidup untuk meraih segala kebaikan dan hanya kepada-Nyalah penulis sandarkan segala harapan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar lebih baik dalam penulisan karangan berikutnya.

Surabaya, 22 Pebruari 2020



Penulis



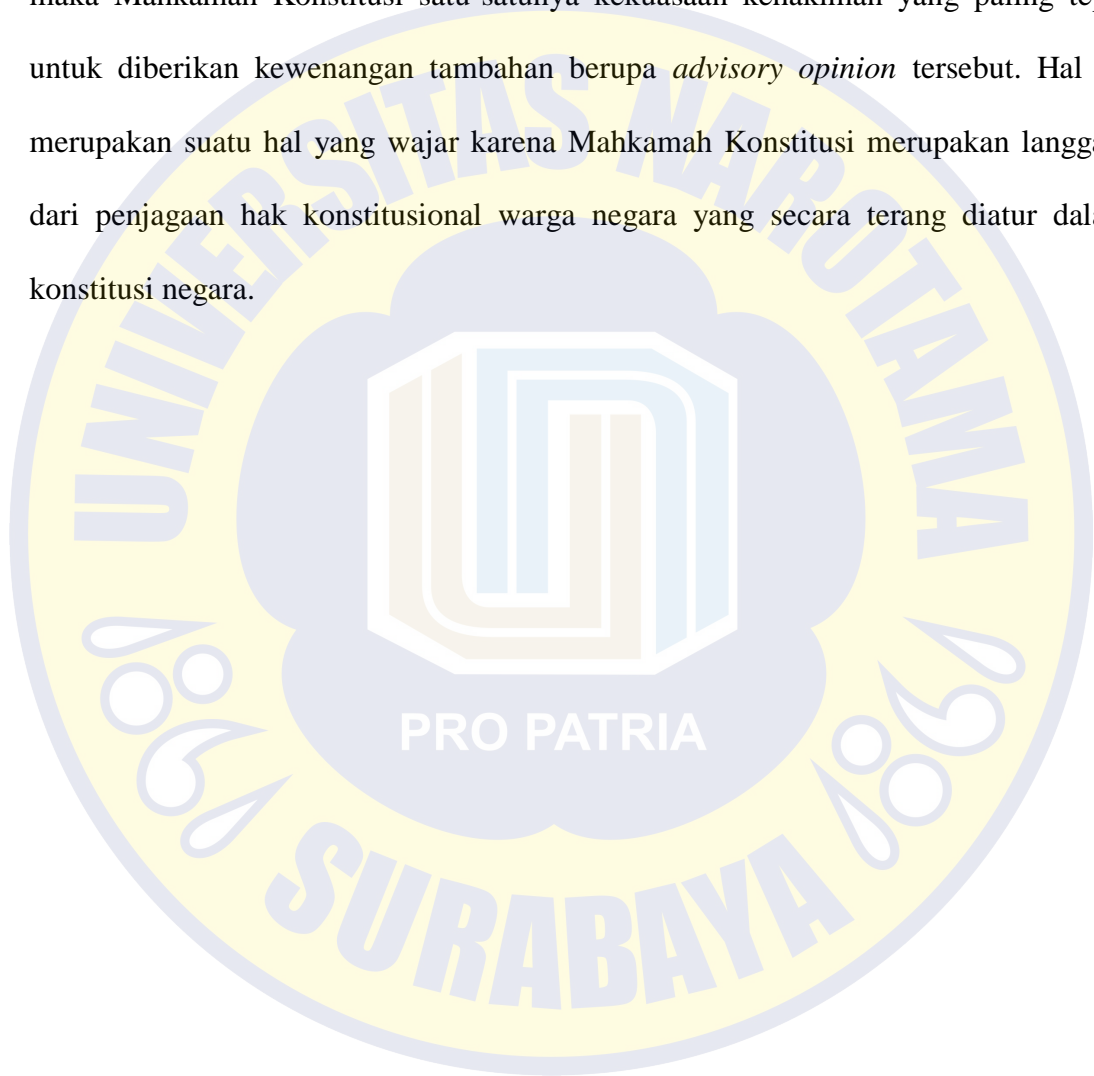
## RINGKASAN

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 telah melegitimasi bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi yang timbul dari ketentuan tersebut ialah supremasi hukum yang harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih. Melalui semangat konstitusionalisme, UUD NRI 1945 menjelma sebagai hukum tertinggi (*The supreme law of the land*) yang harus dijadikan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang muncul pasca amandemen UUD 1945 telah mampu menjelma sebagai pelindung dari konstitusi. Sehingga tidak mengherankan manakala Mahkamah Konstitusi dijuluki sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi), *the sole interpreter of constitution* (penafsir tunggal konstitusi), *the guardian of the democracy* (pengawal demokrasi, dan *the protector of the citizen's constitutional rights* (pelindung hak konstitusional warga negara), atas julukan tersebutlah Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga semangat Pancasila yang melekat dalam pembukaan UUD 1945.

Sehingga dalam hal ini guna mengembalikan eksistensi dibentuknya Mahkamah Konstitusi, penulis dengan semangat memberikan gagasan baru terkait dengan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi berupa *advisory opinion*. *Advisory Opinion* merupakan pranata secara preventif untuk melindungi hak

konstitusional warga negara serta menjamin mekanisme ketatanegaraan yang lebih demokratis. Sehingga dalam konstelasi ketatanegaraan yang ada di Indonesia saat ini, maka Mahkamah Konstitusi satu-satunya kekuasaan kehakiman yang paling tepat untuk diberikan kewenangan tambahan berupa *advisory opinion* tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena Mahkamah Konstitusi merupakan langgam dari penjagaan hak konstitusional warga negara yang secara terang diatur dalam konstitusi negara.



## ABSTRAK

Tesis dengan judul “Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945” ini bertujuan untuk memberikan instrumen baru dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara serta penjagaan mekanisme ketatanegaraan yang lebih demokratis. Guna menguatkan argumentasi tersebut, akan diurai secara sistematis dasar konstitusional pemberian kewenangan *advisory opinion* kepada Mahkamah Konstitusi dan pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila diberikan kewenangan tambahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui pendekatan konseptual penulis mengelaborasi konsep negara hukum sebagai doktrin pemahaman penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Adapun pendekatan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai legitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia serta pendekatan perbandingan penulis gunakan untuk memotret pelaksanaan *ex ante abstract review* di negara Prancis dan Irlandia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pentingnya penjagaan hak konstitusional warga negara dan penjagaan mekanisme ketatanegaraan yang lebih demokratis masih belum terwujud dengan adanya kewenangan lembaga-lembaga negara saat ini. Pencederaan hak konstitusional warga negara kian terasa dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Sehingga urgensi dari penelitian ini ialah: (1). Melindungi hak konstitusional warga negara dan penjagaan mekanisme ketatanegaraan melalui upaya preventif. (2) Upaya preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan kewenangan baru kepada Mahkamah Konstitusi berupa *advisory opinion*. (3). Dalam hal kaitanya memberikan kewenangan tersebut harus ada pembatasan yang jelas sebagai bentuk dari penjagaan doktrin negara hukum.

Kata Kunci : *Advisory Opinion*, Negara Hukum, Mahkamah Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia



## ABSTRACT

The thesis entitled "Granting Advisory Opinion Authority to the Constitutional Court through Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia" aims to provide a new instrument in the effort to protect the constitutional rights of citizens and safeguard more democratic constitutional mechanisms. In order to strengthen the argument, the constitutional basis will be systematically disburshed the authority of the advisory opinion to the Constitutional Court and the limitations of the authority of the Constitutional Court if the additional authority is given. The research method used by the author is normative juridical (normative legal research), with the conceptual approach (conceptual approach), statutory approach, and comparative approach (comparative approach). Through a conceptual approach the writer elaborates the concept of the rule of law as a doctrine of understanding law enforcement and protection in Indonesia. The legislative approach through the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2003 as amended by Law No. 8 of 2011 concerning the Constitutional Court as the legitimacy of the authority of the Constitutional Court in Indonesia and the author's comparative approach to use to photograph the implementation of the ex ante abstract review in the countries of France and Ireland. The results of the study stated that the importance of safeguarding the constitutional rights of citizens and safeguarding more democratic state registration mechanisms has not yet been realized with the existence of the authority of state institutions today. The harming of citizens' constitutional rights is increasingly evidenced by the many laws that have been granted a judicial review in the Constitutional Court. So the urgency of this research are: (1). Protect citizens' constitutional rights and safeguard state registration mechanisms through preventive measures. (2) The preventive effort can be implemented by giving new authority to the Constitutional Court in the form of an advisory opinion. (3). In the case of providing such authority there must be clear restrictions as a form of safeguarding the rule of law.

Keywords: Advisory Opinion, Rule of Law, Constitutional Court, and Human Rights

## DAFTAR ISI

Cover Dalam .....	i
Halaman Persyaratan Gelar .....	ii
Pengesahan Ujian Tesis.....	iii
Pengesahan Revisi Tesis .....	iv
Pengesahan Tim Penguji .....	v
Pernyataan Keaslian .....	v
Motto .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Ringkasan.....	ix
Abstrak .....	xi
Daftar Isi .....	xiii
Daftar Tabel .....	xvi
BAB I Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
3.1. Tujuan Penelitian .....	8
3.2. Manfaat Penelitian .....	8
3.2.1. Manfaat Teoritis.....	8
3.2.2. Manfaat Praktis .....	9
4. Orisinalitas Penelitian .....	9
5. Tinjauan Pustaka.....	11

5.1. Konsep Negara Hukum.....	11
5.1.1. Teori Negara Hukum <i>Rule of Law</i> .....	13
5.1.2. Teori Negara Hukum <i>Rechtsstaat</i> .....	14
5.1.3. Teori Negara Hukum Pancasila .....	15
5.2. Teori Pembatasan Kekuasaan .....	20
5.3. Teori Kewenangan .....	22
5.3.1. Istilah Wewenang .....	23
5.3.2. Sifat Wewenang.....	25
5.3.3. Sumber Wewenang.....	26
5.3.4. Pembatasan Wewenang .....	28
6. Metode Penelitian .....	29
6.1. Tipe Penelitian .....	29
6.2. Pendekatan Masalah .....	30
6.2.1. Pendekatan Konseptual.....	30
6.2.2. Pendekatan Perundang-undangan .....	30
6.2.3. Pendekatan Perbandingan .....	31
6.3. Sumber Bahan Hukum.....	31
6.3.1. Bahan Hukum Primer .....	31
6.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	32
6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	32
6.5. Analisis Bahan Hukum .....	32
7. Sistematika Pembahasan.....	33

BAB II	Dasar Konstitusional Pemberian Kewenangan <i>Advisory Opinion</i> Kepada Mahkamah Konstitusi .....	36
1.	Pengertian <i>Advisory Opinion</i> dan Praktik Penerapannya di Amerika Serikat.....	38
2.	Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi .....	40
3.	Potret Buruknya Kualitas Legislasi di Indonesia .....	47
4.	Persamaan dan Perbedaan antara <i>Advisory Opinion</i> , <i>Constitutional Question</i> , dan <i>Judicial Preview</i> .....	52
BAB III	Batasan Kewenangan <i>Advisory Opinion</i> Mahkamah Konstitusi dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia .....	55
1.	Tiga Rambu Pembatas Kewenangan <i>Advisory Opinion</i> Mahkamah Konstitusi.....	56
2.	<i>Legal Standing</i> Pemohon <i>Advisory Opinion</i> Kepada Mahkamah Konstitusi.....	57
3.	Praktik Penerapan <i>Ex Ante Abstract Review</i> di Negara Prancis dan Firlandia.....	60
BAB IV	Penutup .....	72
1.	Kesimpulan .....	68
2.	Saran .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 01: Perbedaan antara kewenangan delegasi dan mandat

Tabel 02: Perbedaan antara kewenangan delegasi dan mandate

Tabel 03: *State High Courts that Currently Grant Advisory Opinions*

Table 04: Rekapitulasi Jumlah Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Tabel 05: Persamaan dan Perbedaan *Advisory Opinion* dengan *Constitutional Question*

Tabel 06: Persamaan dan Perbedaan *Advisory Opinion* dengan *Judicial Preview*

Tabel 07: Pertimbangan atau Nasihat hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung sesuai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.